

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN DAN MONITORING
PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) SEMESTER 1**

**BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN
2021**

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN DAN MONITORING
PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN**

PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Pengelola Pengaduan Masyarakat (Dumas) adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan di lingkungan Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (Balai PATP) serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan;
- b. Pelaksanaan monitoring dan pengawasan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sebagai salah satu bentuk analisa dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang operasional maupun pembinaan serta mengukur target pencapaian kinerja sebagaimana yang telah direncanakan oleh setiap satuan unit kerja di lingkup Balitbangtan Kemantan.

2. Dasar

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 19 tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- d. Peraturan Menteri Pertanian No. 77/ Permentan/OT.140/8/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Pertanian;

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Laporan ini disusun dengan maksud sebagai pertanggungjawaban atas perintah pelaksanaan pengawasan dan monitoring dan memberikan gambaran tentang pelaksanaan tupoksi serta pencapaian kinerja dan kendala yang dihadapi.

b. Tujuan

Laporan ini disusun dengan tujuan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan dalam mengambil keputusan dan menentukan kebijakan lebih lanjut.

4. Ruang Lingkup

Materi yang tertuang dalam laporan ini meliputi kondisi data/fakta di bidang Operasional, SDM/Personel, sarana prasarana di Balai PATP.

PELAKSANAAN TUGAS

1. Personel pelaksana

Ketua : Yadi Rusyadi, S.Si. M.Si

Wakil Ketua : Nurjaman, S.TP, M.M

Sekretaris : Erwin Maulana, S.Kom

Anggota :

a. Fenny Sumardiani, SH

b. Ade Rachmad Santosa, S.Sos.

c. Tjipto Rahayu, A.Md.

2. Waktu pelaksanaan

Kegiatan pengawasan dan monitoring dilaksanakan dari Januari – Juni 2021 dan sampai saat ini belum dilaksanakan dikarenakan belum adanya pengaduan masyarakat ke Balai PATP

3. Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dan monitoring Dumas, maka Tim monitoring telah melaksanakan pengecekan tahapan manajemen, meliputi :

- a. aspek perencanaan
- b. rencana kegiatan tahunan, bulanan, mingguan dan harian;
- c. rencana tingkat capaian (target) yang ditetapkan;
- d. sarana prasarana yang dibutuhkan;
- e. permasalahan yang dihadapi.
- f. aspek pengorganisasian
- g. struktur organisasi
- h. permasalahan yang dihadapi.

4. Klarifikasi dan Permintaan Dokumen Polres Soreang Bandung Terkait Kegiatan Bekerja Tahun 2019

Menindaklanjuti surat panggilan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Kota Bandung nomor B/318/X/2020/Reskrim tanggal 5 Oktober 2020, maka pada tanggal 20 Oktober 2020 Tim BEKERJA Kabupaten Bandung 2019 Balai PATP yang dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan perwakilan POKJA Pengadaan Kegiatan BEKERJA Kabupaten Bandung, Kania Tresnawati, STP dan Yadi Rusyadi, S.Si., M.Si hadir memenuhi panggilan dari TIPIKOR Polres Soreang.

Pada panggilan pertama ini PPK dan Pokja Pengadaan Kegiatan BEKERJA Kab. Bandung dimintai keterangan mengenai data pribadi serta informasi mengenai kegiatan

BEKERJA secara umum dari sisi tugas pokok dan fungsi PPK serta Pokja Pengadaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan pakan pada program BEKERJA Kabupaten Bandung. Pemeriksaan dilakukan mulai jam 10.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.

Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2021 Tim Kembali mendapat panggilan dari Tipikor Polres Soreang untuk pemeriksaan lanjutan kedua. Pada panggilan kedua ini hanya PPK yang dimintai keterangan lebih lanjut terutama terkait pelaksanaan pengadaan bantuan pakan pada kegiatan Program BEKERJA Kementan di Kabupaten Bandung, khususnya Kecamatan Pangalengan, Cimaung dan Banjaran. Menurut Tipikor pemeriksaan ini dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat terkait pelaksanaan distribusi bantuan pakan kepada masyarakat.

Pada panggilan kedua ini, PPK memberikan keterangan secara detil mengenai seluruh kontrak pengadaan bantuan pakan yang dilaksanakan selama kegiatan Program BEKERJA ini berlangsung. PPK mengacu kepada aturan-aturan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan ini serta mengacu kepada petunjuk teknis dan panduan pelaksanaan kegiatan Program BEKERJA yang disusun oleh Balitbangtan.

Selanjutnya Balai PATP menunggu panggilan berikutnya dan ditindaklanjuti serta didukung dengan dokumen yang lengkap.

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang melaporkan,
Ketua,



Yadi Rusyadi, S.Si, M.Si
NIP. 19700209200031001